

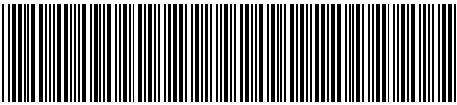
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692006/2026**

A. Dasar Hukum:								
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.								
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.								
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026								
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:								
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM					
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL					
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH					
4. Kode/Nama Satker	:	(692006)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH					
Sebesar	:	Rp.	22.157.098.000	(DUA PULUH DUA MILIAR SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)				
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :								
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
03.03	PEMBINAAN HUKUM							
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :								
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				Jumlah Uang			
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum							
				Rp.	22.157.098.000			
				Rp.	22.157.098.000			
C. Sumber Dana Berasal Dari :								
1. Rupiah Murni	Rp.	22.157.098.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :								
1. KPPN SEMARANG I	(026) Rp.	22.157.098.000						
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)								
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).								
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).								
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.								
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.								
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.								
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).								
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.								

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA



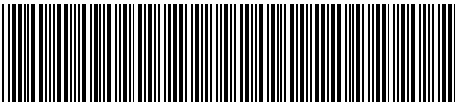
DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			22.157.098.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			22.157.098.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen			
	:	2. 01	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	17.246.154.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Kerja Sama	1.00	Layanan	299.272.000
	:	02	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	109.180.000
	:	03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	111.760.000
	:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	16.700.242.000
	:	05	EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	18.600.000
	:	06	EBA.Z07 Layanan BMN	1.00	Layanan	7.100.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	61,00	Unit, m2, Paket	4.600.856.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	60.00	Unit	683.017.000
	:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	3.917.839.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	144,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	139.968.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	144.00	Orang	139.968.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	170.120.000
Rincian Output	:	01	EBD.001 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	100.000.000
	:	02	EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Rekomendasi	8.000.000
	:	03	EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	17.210.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6692-4781-0940-3119

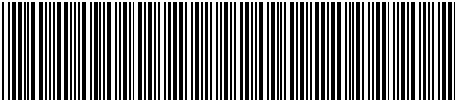
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan, Rekomendasi		
04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	20.870.000
05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	7.840.000
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	16.200.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6692-4781-0940-3119

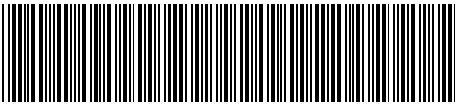
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	22.157.098.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	22.157.098.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

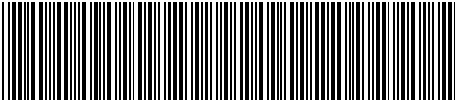


DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	12.340.578	5.215.664	4.600.856	-	-	22.157.098	03 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.340.578	5.215.664	4.600.856	-	-	22.157.098		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	12.340.578	5.215.664	4.600.856	-	-	22.157.098		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	12.340.578	4.905.576	-	-	-	17.246.154		
01	RM	12.340.578	4.905.576	-	-	-	17.246.154		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856		
01	RM	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	139.968	-	-	-	139.968		
01	RM	-	139.968	-	-	-	139.968		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	170.120	-	-	-	170.120		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

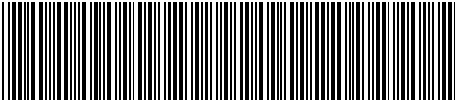
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	170.120	-	-	-	170.120	026	
JUMLAH		12.340.578	5.215.664	4.600.856	-	-	22.157.098		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

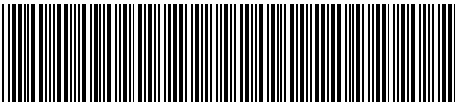
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.161.144	2.020.880	2.122.276	2.837.483	1.323.173	2.103.843	1.376.986	2.527.083	1.338.071	2.558.666	1.323.181	1.464.308	22.157.098
		BELANJA PEGAWAI	773.830	899.409	1.673.239	899.409	899.409	1.673.239	899.409	899.409	899.409	899.409	899.409	1.024.998	12.340.578
		BELANJA BARANG	387.314	438.454	449.037	438.074	423.764	430.604	477.577	427.674	438.662	441.418	423.772	439.310	5.215.664
		BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.161.144	2.020.880	2.122.276	2.837.483	1.323.173	2.103.843	1.376.986	2.527.083	1.338.071	2.558.666	1.323.181	1.464.308	22.157.098
		51 BELANJA PEGAWAI	773.830	899.409	1.673.239	899.409	899.409	1.673.239	899.409	899.409	899.409	899.409	899.409	1.024.998	12.340.578
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	387.314	438.454	449.037	438.074	423.764	430.604	477.577	427.674	438.662	441.418	423.772	439.310	5.215.664
		53 BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV A. B L O K I R



DS:6692-4781-0940-3119

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

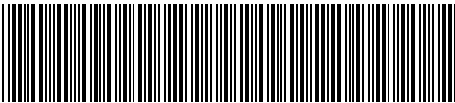
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6692-4781-0940-3119

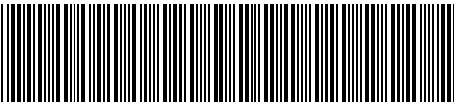
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 3.917.839		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Pekerjaan Peninggian Halaman Gedung Kantor dengan luas paving 4566 Rp. 3.917.839		
	m2, luas pagar lanskap 300 m2, dan panjang saluran 700 m		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692006/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode/Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
- Sebesar : Rp. 21.229.827.000 (DUA PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 21.229.827.000
Rp. 21.229.827.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 21.229.827.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 21.229.827.000

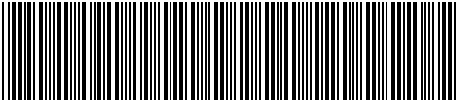
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA



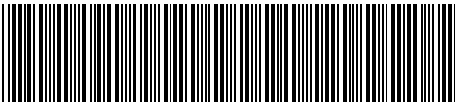
DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				21.229.827.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				21.229.827.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	16.418.196.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Kerja Sama		1.00	Layanan	185.695.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	65.011.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	68.812.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	16.085.753.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	7.490.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	5.435.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		61,00	Unit, m2, Paket	4.600.856.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		60.00	Unit	683.017.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		1.00	Unit	3.917.839.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		144,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	102.567.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		144.00	Orang	102.567.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Layanan, Rekomendasi	108.208.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	57.499.000
		02	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	4.988.000
		03	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	12.223.000
		04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	14.118.000
		05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Layanan	7.010.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I A. INFORMASI KINERJA

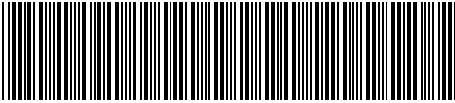


DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Layanan, Rekomendasi	
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan 12.370.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
I B. SUMBER DANA



DS:5626-9450-0064-5003

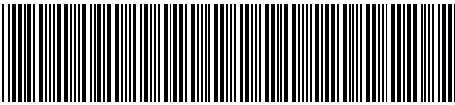
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	21.229.827.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	21.229.827.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



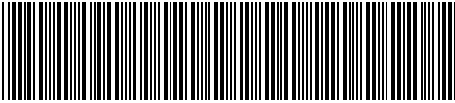
DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	12.307.439	4.321.532	4.600.856	-	-	21.229.827	03 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.307.439	4.321.532	4.600.856	-	-	21.229.827		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	12.307.439	4.321.532	4.600.856	-	-	21.229.827		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	12.307.439	4.110.757	-	-	-	16.418.196		
01	RM	12.307.439	4.110.757	-	-	-	16.418.196		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856		
01	RM	-	-	4.600.856	-	-	4.600.856		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	102.567	-	-	-	102.567		
01	RM	-	102.567	-	-	-	102.567		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	108.208	-	-	-	108.208		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

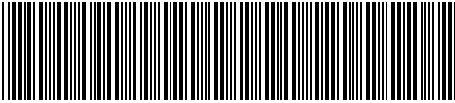
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	108.208	-	-	-	108.208	026	
JUMLAH		12.307.439	4.321.532	4.600.856	-	-	21.229.827		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692006) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

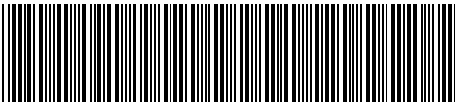
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.385.663	2.068.680	1.385.663	2.885.663	1.385.663	1.385.663	1.385.663	2.585.663	1.385.663	2.603.502	1.385.663	1.386.678	21.229.827
		BELANJA PEGAWAI	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.773	12.307.439
		BELANJA BARANG	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.905	4.321.532
		BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.385.663	2.068.680	1.385.663	2.885.663	1.385.663	1.385.663	1.385.663	2.585.663	1.385.663	2.603.502	1.385.663	1.386.678	21.229.827
		51 BELANJA PEGAWAI	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.606	1.025.773	12.307.439
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.057	360.905	4.321.532
		53 BELANJA MODAL	0	683.017	0	1.500.000	0	0	0	1.200.000	0	1.217.839	0	0	4.600.856

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV A. B L O K I R



DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

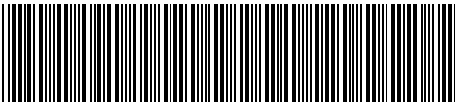
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692006/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5626-9450-0064-5003

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692006] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692006	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 3.917.839		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Pekerjaan Peninggian Halaman Gedung Kantor dengan luas paving 4566 Rp. 3.917.839		
	m2, luas pagar lanskap 300 m2, dan panjang saluran 700 m		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



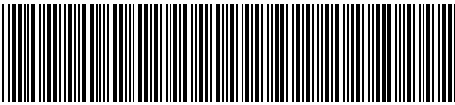
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692046/2026**

<

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I A. INFORMASI KINERJA

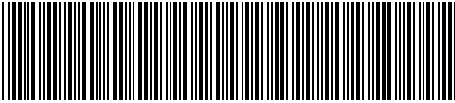


DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						3.448.774.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						3.448.774.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							
		2. 01	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan							
		3. 01	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			4,00	layanan	1.081.854.000	
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4.00	layanan	1.081.854.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga			1,00	Perkara	15.390.000	
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah			1.00	Perkara	15.390.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			30,00	Lembaga	2.299.440.000	
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah			30.00	Lembaga	2.299.440.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	52.090.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			1.00	Laporan	52.090.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I B. SUMBER DANA



DS:2860-0125-8181-2131

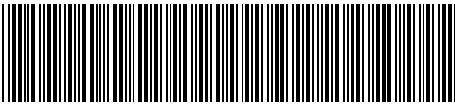
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.448.774.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



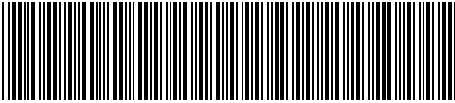
DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692046	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774	03 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854		
04	PNBP	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	15.390	-	-	-	15.390		
04	PNBP	-	15.390	-	-	-	15.390		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440		
04	PNBP	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	52.090	-	-	-	52.090	03 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

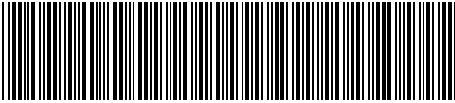
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	52.090	-	-	-	52.090	026	
JUMLAH		-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

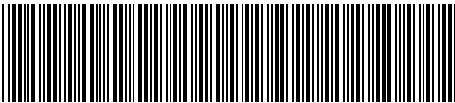
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692046	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		BELANJA BARANG	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R



DS:2860-0125-8181-2131

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

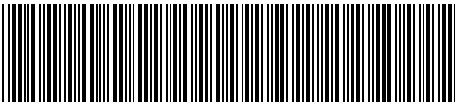
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2860-0125-8181-2131

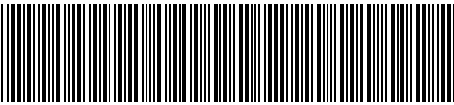
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692046/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
- Sebesar : Rp. 3.448.774.000 (TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 3.448.774.000
Rp. 3.448.774.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 3.448.774.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 3.448.774.000

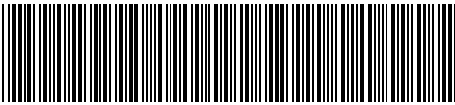
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8288-3294-0785-4640

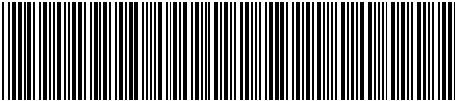
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

										Halaman : I A. 1	
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							3.448.774.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							3.448.774.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					4,00	layanan	1.081.854.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					4,00	layanan	1.081.854.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga					1,00	Perkara	15.390.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah					1,00	Perkara	15.390.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					30,00	Lembaga	2.299.440.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah					30,00	Lembaga	2.299.440.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	52.090.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah					1,00	Laporan	52.090.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
I B. SUMBER DANA



DS:8288-3294-0785-4640

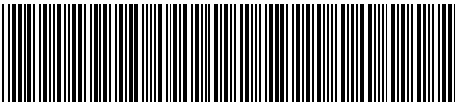
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.448.774.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



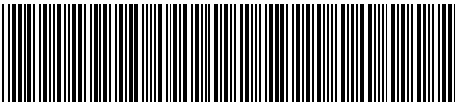
DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692046	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774	03 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854		
04	PNBP	-	1.081.854	-	-	-	1.081.854		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	15.390	-	-	-	15.390		
04	PNBP	-	15.390	-	-	-	15.390		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440		
04	PNBP	-	2.299.440	-	-	-	2.299.440		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	52.090	-	-	-	52.090	03 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

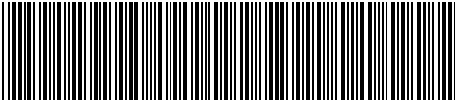
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04	PNBP	-	52.090	-	-	-	52.090	026@	
JUMLAH		-	3.448.774	-	-	-	3.448.774		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692046) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

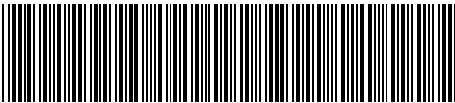
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692046	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		BELANJA BARANG	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	61.076	94.413	516.794	210.187	485.677	298.492	667.337	599.265	40.792	42.991	431.750	3.448.774

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R



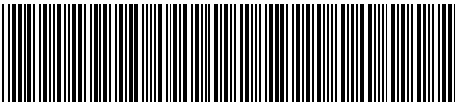
DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692046	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.482.991	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.482.991	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.137
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.469		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.314
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.900		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.986
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.807	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.470
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.900	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.095
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.700	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 263
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.233	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
		521211	Belanja Bahan(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV A. B L O K I R



DS:8288-3294-0785-4640

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

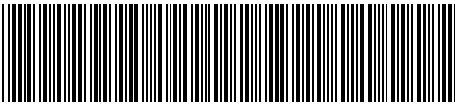
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.130 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 526 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 831.300 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.490 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.571 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.171 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692046/2026
IV B. C A T A T A N



DS:8288-3294-0785-4640

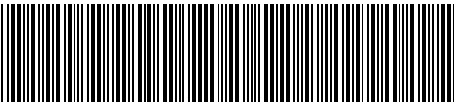
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692046] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



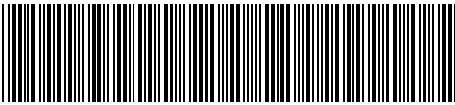
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692993/2026**

A. Dasar Hukum:								
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.								
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.								
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026								
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:								
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM					
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL					
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH					
4. Kode/Nama Satker	:	(692993)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH					
Sebesar	:	Rp. 2.885.803.000	(DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :								
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
03.03	PEMBINAAN HUKUM							
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :								
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				Jumlah Uang			
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							
				Rp.	2.885.803.000			
				Rp.	2.885.803.000			
C. Sumber Dana Berasal Dari :								
1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			
- PNBP TA Berjalan	Rp.	2.885.803.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :								
1. KPPN SEMARANG I	(026) Rp.	2.885.803.000						
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)								
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).								
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).								
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.								
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.								
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.								
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).								
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.								

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2977-4073-3031-9869

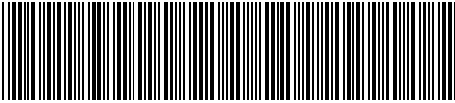
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.885.803.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.885.803.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani			
	:	2. 01	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan			
	:	3. 01	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	60.000.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01 Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	150.00	orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	2.103.843.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.599.275.000
	:	02	BAH.002 Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	504.568.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	721.960.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	721.960.000

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I B. SUMBER DANA



DS:2977-4073-3031-9869

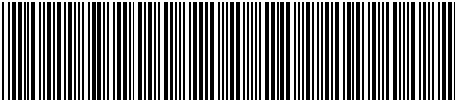
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.885.803.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

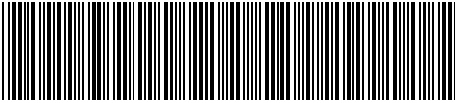
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692993	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803	03 . 51	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	60.000	-	-	-	60.000		
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843		
04	PNBP	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	721.960	-	-	-	721.960		
04	PNBP	-	721.960	-	-	-	721.960	026	
JUMLAH		-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

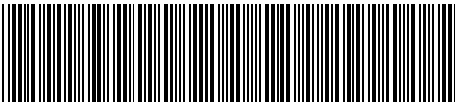
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692993	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		BELANJA BARANG	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R



DS:2977-4073-3031-9869

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

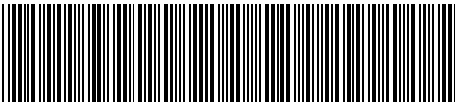
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2977-4073-3031-9869

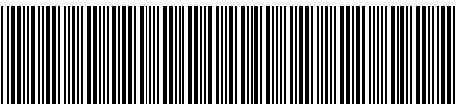
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692993/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
- Sebesar : Rp. 2.885.803.000 (DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.885.803.000
Rp. 2.885.803.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.885.803.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 2.885.803.000

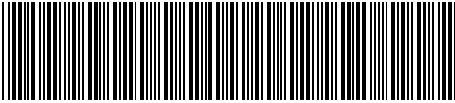
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2104-5006-5541-0340

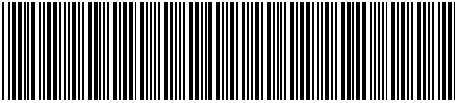
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						2.885.803.000	
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						2.885.803.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			150,00	orang	60.000.000	
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			150.00	orang	60.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			2,00	layanan	2.103.843.000	
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	1.599.275.000	
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	504.568.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik			2,00	dokumen, Peta, Data	721.960.000	
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah			2.00	Data	721.960.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
I B. SUMBER DANA



DS:2104-5006-5541-0340

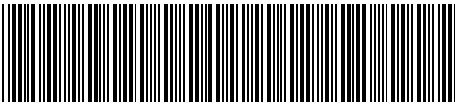
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.885.803.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

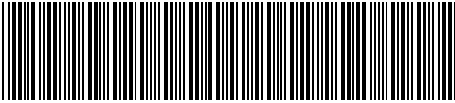
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692993	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803	03 . 51 026@ 03 . 51 026@ 03 . 51 026@	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	60.000	-	-	-	60.000		
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843		
04	PNBP	-	2.103.843	-	-	-	2.103.843		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	721.960	-	-	-	721.960		
04	PNBP	-	721.960	-	-	-	721.960		
JUMLAH		-	2.885.803	-	-	-	2.885.803		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (692993) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

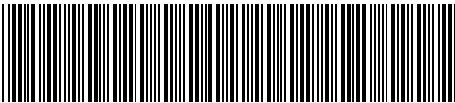
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692993	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		BELANJA BARANG	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	107.373	400.250	260.494	150.473	610.174	337.803	406.975	100.743	221.916	249.704	39.898	2.885.803

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R



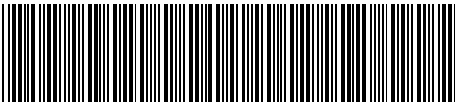
DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692993	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.016.753		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.016.753	522141	Belanja Sewa(PNBP)
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.500 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.400 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.080		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.580 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.490	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 329.133 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.160		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.310 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 225.464 Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.876		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)	7121.BMA	Data dan Informasi Publik
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(PNBP)
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.684		
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV A. B L O K I R



DS:2104-5006-5541-0340

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

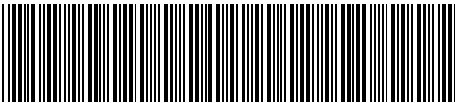
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.202 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.680 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 220.934 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.260 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692993/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2104-5006-5541-0340

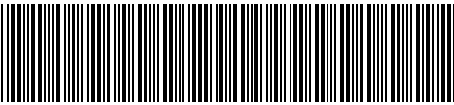
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [692993] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001



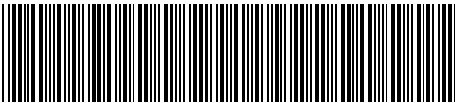
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693026/2026**

A. Dasar Hukum:								
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.								
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.								
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026								
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:								
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM					
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH					
4. Kode>Nama Satker	:	(693026)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH					
Sebesar	:	Rp. 517.000.000	(LIMA RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :								
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
03.03	PEMBINAAN HUKUM							
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :								
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				Jumlah Uang			
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah							
				Rp.	517.000.000			
				Rp.	517.000.000			
C. Sumber Dana Berasal Dari :								
1. Rupiah Murni	Rp.	517.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :								
1. KPPN SEMARANG I	(026) Rp.	517.000.000						
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)								
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).								
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).								
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.								
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.								
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.								
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).								
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.								

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			517.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			517.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
		2. 02	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	30,00	Rekomendasi Kebijakan	404.595.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah	30,00	Rekomendasi Kebijakan	404.595.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	68.680.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	1,00	Lembaga	68.680.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	43.725.000
Rincian Output	:	01 FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,00	Laporan	43.725.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I B. SUMBER DANA

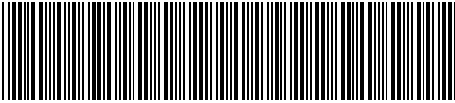


Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	517.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	517.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
						(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

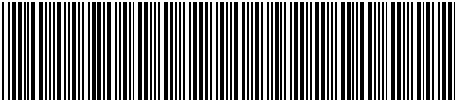
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693026	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	517.000	-	-	-	517.000	03 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	517.000	-	-	-	517.000		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	517.000	-	-	-	517.000		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	404.595	-	-	-	404.595		
01	RM	-	404.595	-	-	-	404.595		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	68.680	-	-	-	68.680		
01	RM	-	68.680	-	-	-	68.680		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	43.725	-	-	-	43.725		
01	RM	-	43.725	-	-	-	43.725		
JUMLAH		-	517.000	-	-	-	517.000		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

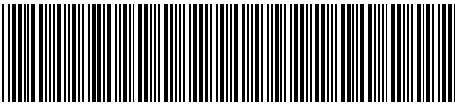
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693026	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
		BELANJA BARANG	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.332	29.982	63.911	49.086	42.082	50.922	52.592	40.082	93.547	52.042	39.222	2.200	517.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV A. B L O K I R



DS:6272-0078-6170-0604

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

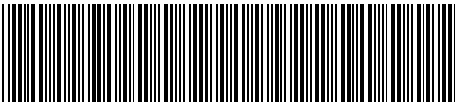
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6272-0078-6170-0604

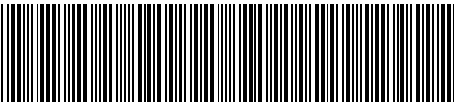
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693026/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
- Sebesar : Rp. 329.823.000 (TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
- 135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 329.823.000
Rp. 329.823.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 329.823.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 329.823.000

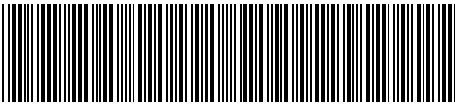
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

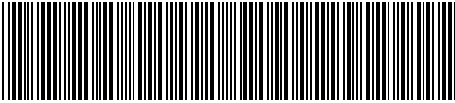
Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				329.823.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				329.823.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		30,00	Rekomendasi Kebijakan	257.957.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah		30.00	Rekomendasi Kebijakan	257.957.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	44.244.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah		1.00	Lembaga	44.244.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	27.622.000
Rincian Output	:	01	FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	27.622.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7133-4983-7220-8414

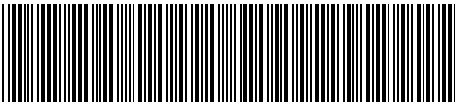
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	329.823.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	329.823.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

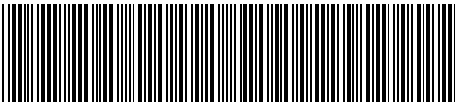
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693026	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	329.823	-	-	-	329.823	03 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	329.823	-	-	-	329.823		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	329.823	-	-	-	329.823		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	257.957	-	-	-	257.957		
01	RM	-	257.957	-	-	-	257.957		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	44.244	-	-	-	44.244		
01	RM	-	44.244	-	-	-	44.244		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	27.622	-	-	-	27.622		
01	RM	-	27.622	-	-	-	27.622	026	
JUMLAH		-	329.823	-	-	-	329.823		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693026) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

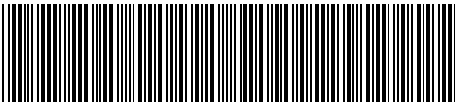
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	693026	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH														
		RENCANA PENARIKAN DANA	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
		BELANJA BARANG	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	28.148	329.823

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV A. B L O K I R



DS:7133-4983-7220-8414

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

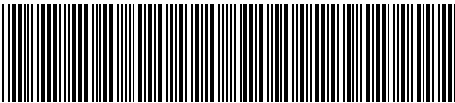
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693026/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7133-4983-7220-8414

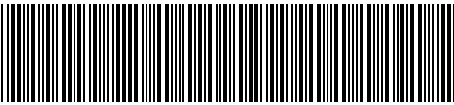
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693026] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693094/2026**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 - 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
 - 4. Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
 - Sebesar : Rp. 4.600.841.000 (EMPAT MILIAR ENAM RATUS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	4.600.841.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 4.600.841.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

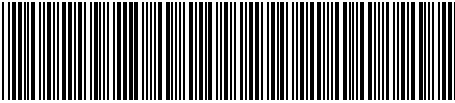
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

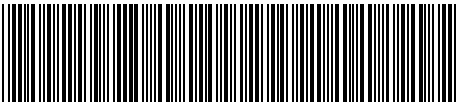


DS:2087-3642-4816-6626

Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	38.301.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	38.301.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.562.540.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	4.562.540.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA



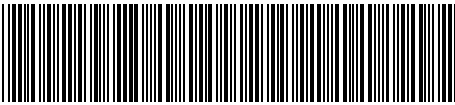
DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			38.301.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			38.301.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	1.00	Rekomendasi Kebijakan	38.301.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.562.540.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			4.562.540.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi			
	:	2. 01	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan			
	:	3. 01	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20,00	Lembaga	69.100.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	20.00	Lembaga	69.100.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300,00	Orang	55.131.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	300.00	Orang	55.131.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	58,00	Lembaga	35.749.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	58.00	Lembaga	35.749.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2087-3642-4816-6626

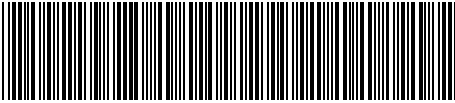
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	15.020.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	Data	15.020.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		442,00	Orang	3.536.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	442,00	Orang	3.536.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		62,00	Kelompok Masyarakat	661.540.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	62,00	Kelompok Masyarakat	661.540.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	190.000.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1,00	Lembaga	190.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I B. SUMBER DANA



DS:2087-3642-4816-6626

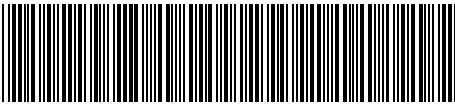
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	4.600.841.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	4.600.841.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



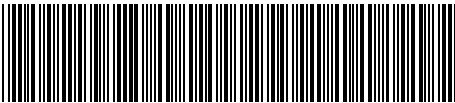
DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	4.600.841	-	-	-	4.600.841	03 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	38.301	-	-	-	38.301		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	38.301	-	-	-	38.301		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	38.301	-	-	-	38.301		
01	RM	-	38.301	-	-	-	38.301		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.562.540	-	-	-	4.562.540		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	4.562.540	-	-	-	4.562.540		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	69.100	-	-	-	69.100		
01	RM	-	69.100	-	-	-	69.100		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	55.131	-	-	-	55.131		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

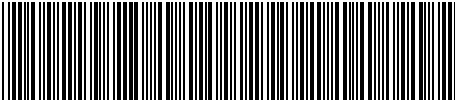


DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	55.131	-	-	-	55.131	026	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	35.749	-	-	-	35.749	03 . 51	
01 RM		-	35.749	-	-	-	35.749	026	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	15.020	-	-	-	15.020	03 . 51	
01 RM		-	15.020	-	-	-	15.020	026	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	3.536.000	-	-	-	3.536.000	03 . 51	
01 RM		-	3.536.000	-	-	-	3.536.000	026	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	661.540	-	-	-	661.540	03 . 51	
01 RM		-	661.540	-	-	-	661.540	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

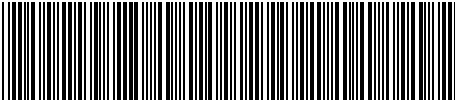
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	190.000	-	-	-	190.000	03 . 51	
	01 RM	-	190.000	-	-	-	190.000	026	
JUMLAH		-	4.600.841	-	-	-	4.600.841		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

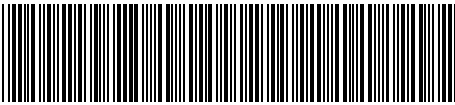
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.000	352.498	130.705	328.216	195.426	307.795	154.687	947.312	1.013.998	434.163	656.040	4.600.841
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	80.000	352.498	130.705	328.216	195.426	307.795	154.687	947.312	1.013.998	434.163	656.040	4.600.841
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	752	0	10.080	0	11.811	6.018	9.140	500	0	0	38.301
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	752	0	10.080	0	11.811	6.018	9.140	500	0	0	38.301
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		0	80.000	351.745	130.705	318.136	195.426	295.985	148.669	938.172	1.013.498	434.163	656.040	4.562.540	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.000	351.745	130.705	318.136	195.426	295.985	148.669	938.172	1.013.498	434.163	656.040	4.562.540

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV A. B L O K I R



DS:2087-3642-4816-6626

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

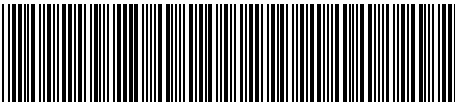
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2087-3642-4816-6626

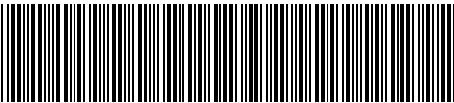
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693094/2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 - 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
 - 4. Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
 - Sebesar : Rp. 3.591.177.000 (TIGA MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	3.591.177.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 3.591.177.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

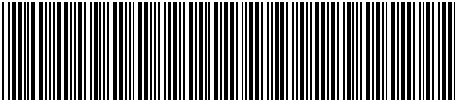
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026

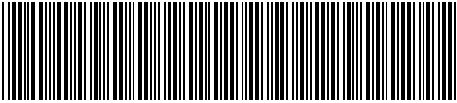


DS:6680-0744-1110-8441

Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	24.093.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	24.093.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.567.084.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	3.567.084.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA



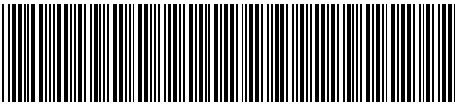
DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				24.093.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				24.093.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.093.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	24.093.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				3.567.084.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				3.567.084.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		20,00	Lembaga	41.559.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		20.00	Lembaga	41.559.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	32.679.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	32.679.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		58,00	Lembaga	19.693.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		58.00	Lembaga	19.693.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	8.878.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	8.878.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6680-0744-1110-8441

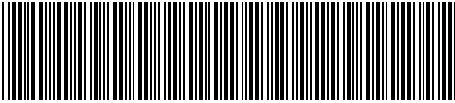
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		442,00	Orang	2.828.800.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	442.00	Orang	2.828.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		62,00	Kelompok Masyarakat	529.232.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	62.00	Kelompok Masyarakat	529.232.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	106.243.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	106.243.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
I B. SUMBER DANA



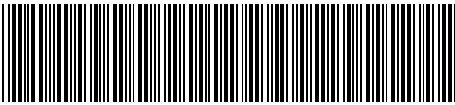
DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.591.177.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	3.591.177.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



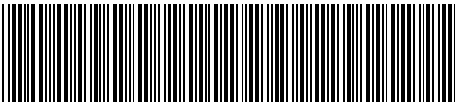
DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	3.591.177	-	-	-	3.591.177	03 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	24.093	-	-	-	24.093		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	24.093	-	-	-	24.093		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	24.093	-	-	-	24.093		
01	RM	-	24.093	-	-	-	24.093		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.567.084	-	-	-	3.567.084		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	3.567.084	-	-	-	3.567.084		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	41.559	-	-	-	41.559		
01	RM	-	41.559	-	-	-	41.559		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	32.679	-	-	-	32.679		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

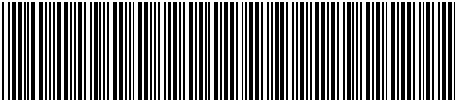


DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	32.679	-	-	-	32.679	026	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	19.693	-	-	-	19.693	03 . 51	
01 RM		-	19.693	-	-	-	19.693	026	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	8.878	-	-	-	8.878	03 . 51	
01 RM		-	8.878	-	-	-	8.878	026	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	2.828.800	-	-	-	2.828.800	03 . 51	
01 RM		-	2.828.800	-	-	-	2.828.800	026	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	529.232	-	-	-	529.232	03 . 51	
01 RM		-	529.232	-	-	-	529.232	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

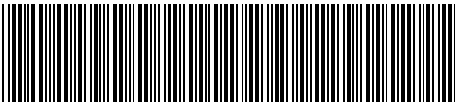
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	106.243	-	-	-	106.243	03 . 51	
01 RM		-	106.243	-	-	-	106.243	026	
JUMLAH		-	3.591.177	-	-	-	3.591.177		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693094) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

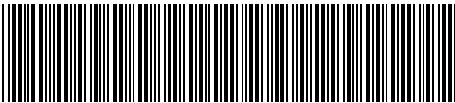
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.000	352.498	130.705	326.386	195.426	160.419	110.747	928.542	984.720	321.733	0	3.591.177
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	80.000	352.498	130.705	326.386	195.426	160.419	110.747	928.542	984.720	321.733	0	3.591.177
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	752	0	10.080	0	6.743	6.018	0	500	0	0	24.093
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	752	0	10.080	0	6.743	6.018	0	500	0	0	24.093
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	80.000	351.745	130.705	316.306	195.426	153.677	104.729	928.542	984.220	321.733	0	3.567.084
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.000	351.745	130.705	316.306	195.426	153.677	104.729	928.542	984.220	321.733	0	3.567.084

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV A. B L O K I R



DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

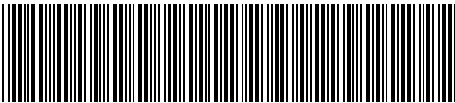
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693094/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6680-0744-1110-8441

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693094] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

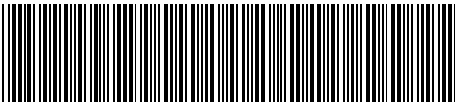
Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8587-8053-5306-1007

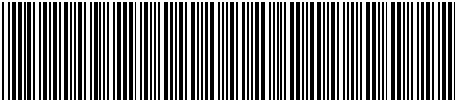
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

								Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen					119.070.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah					119.070.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2,00	Rekomendasi Kebijakan			103.210.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	2.00	Rekomendasi Kebijakan			103.210.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	orang			15.860.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	100.00	orang			15.860.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I B. SUMBER DANA



DS:8587-8053-5306-1007

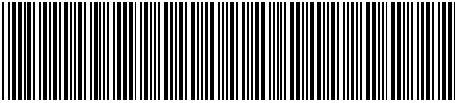
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	119.070.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	119.070.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

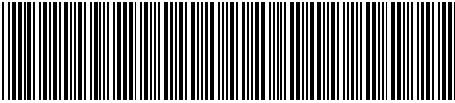
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693128	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	119.070	-	-	-	119.070	03 . 51	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	119.070	-	-	-	119.070		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	119.070	-	-	-	119.070		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	103.210	-	-	-	103.210		
01	RM	-	103.210	-	-	-	103.210		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	15.860	-	-	-	15.860		
01	RM	-	15.860	-	-	-	15.860		
JUMLAH		-	119.070	-	-	-	119.070		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

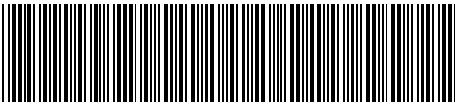
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693128	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
		BELANJA BARANG	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.000	12.610	10.910	30.830	11.110	25.730	12.240	14.050	590	0	0	119.070

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV A. B L O K I R



DS:8587-8053-5306-1007

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

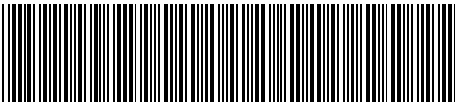
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV B. C A T A T A N



DS:8587-8053-5306-1007

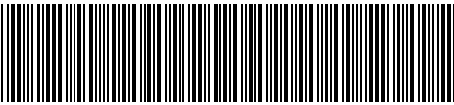
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693128/2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 - 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
 - 4. Kode/Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
 - Sebesar : Rp. 69.508.000 (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang
Rp. 69.508.000
Rp. 69.508.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	69.508.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 69.508.000

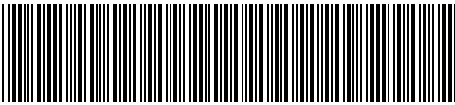
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4354-2274-2222-9789

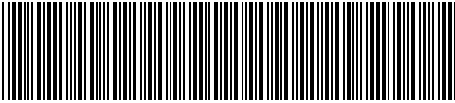
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen						69.508.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						69.508.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM			2,00	Rekomendasi Kebijakan	60.513.000	
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			2.00	Rekomendasi Kebijakan	60.513.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			100,00	orang	8.995.000	
Rincian Output	:	01	AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum			100.00	orang	8.995.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
I B. SUMBER DANA



DS:4354-2274-2222-9789

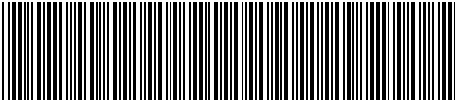
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	69.508.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	69.508.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
Kewenangan : (KD)

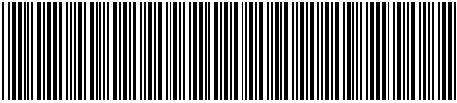
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693128	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	-	69.508	-	-	-	69.508	03 . 51	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	69.508	-	-	-	69.508		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	69.508	-	-	-	69.508		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	60.513	-	-	-	60.513		
01	RM	-	60.513	-	-	-	60.513		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	8.995	-	-	-	8.995		
01	RM	-	8.995	-	-	-	8.995		
JUMLAH		-	69.508	-	-	-	69.508		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (693128) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

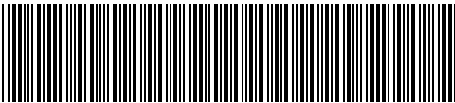
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693128	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
		BELANJA BARANG	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	4.164	1.340	14.850	9.809	14.104	16.536	7.720	985	0	0	69.508
										</					

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV A. B L O K I R



DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

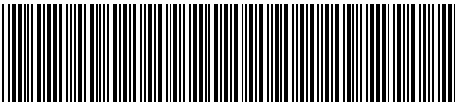
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693128/2026
IV B. C A T A T A N



DS:4354-2274-2222-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [693128] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001